

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun demikian belum semua sektor kesehatan berkualitas baik salah satunya adalah permasalahan mengenai stunting. Stunting merupakan kondisi seseorang yang memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan dengan sekelompok orang pada usianya. Sebagai contoh anak yang usia 5 tahun seharusnya memiliki tinggi badan 87cm, namun ada beberapa anak yang tinggi badannya 60cm. Dampak dari stunting adalah kognitif dan psikomotorik terhambat sulit menguasai ilmu pengetahuan dan berprestasi dalam olahraga, lebih mudah terserang penyakit degeneratif, dan sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Pencegahan stunting tersebut dilaksanakan dengan aksi konvergensi. Aksi konvergensi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah stunting, dengan berkoordinasi lintas sektor.

Gagal tumbuh pada balita (bayi di bawah lima tahun) disebabkan karena kekurangan gizi kronis, sehingga membuat anak menjadi pendek untuk usianya. Malnutrisi tidak tampak sebelum bayi lahir dan pada hari-hari pertama setelah lahir, namun penurunan tidak tampak hingga bayi berusia 2 tahun. Bayi cacat dan cacat berat adalah bayi yang panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umur dibandingkan dengan standar WHO MGRS (*Multi-Center Comparative Growth Study* tahun 2006). (Nurlatif & Priharwanti, 2019)

Tabel 1. Data stunting di Indonesia pada tahun 2023.

No.	Provinsi	Jumlah Balita
a.	Jawa Barat	3,172,354
b.	Jawa Timur	2,115,875
c.	Jawa Tengah	2,051,484
d.	Sumatera Utara	893,704
e.	Banten	850,690
f.	Sumatera Selatan	608,280
g.	Sulawesi Selatan	595,531
h.	Lampung	530,564
i.	Dki Jakarta	472,113
j.	Nusa Tenggara Barat	437,528
k.	Nusa Tenggara Timur	433,702
l.	Riau	402,497
m.	Sumatera Barat	393,475
n.	Aceh	392,733
o.	Maluku Utara	296,948
p.	Kalimantan Selatan	260,535
q.	Kalimantan Barat	229,169
r.	Jambi	210,704
s.	Sulawesi Tengah	183,063
t.	Bali	176,264
u.	Kalimantan Timur	173,814
v.	Sulawesi Tenggara	164,785
w.	Yogyakarta	161,908
x.	Maluku	153,429
y.	Sulawesi Utara	130,802
z.	Kalimantan Tengah	123,753
aa.	Kepulauan Riau	122,287
bb.	Bengkulu	114,542
cc.	Kepulauan Bangka Belitung	106,202
dd.	Sulawesi Barat	102,141
ee.	Gorontalo	82,153
ff.	Papua Pegunungan	70,387
gg.	Papua Selatan	61,969
hh.	Kalimantan Utara	45,395
ii.	Papua	42,784
jj.	Papua Barat Daya	36,118
kk.	Papua Barat	34,116
ll.	Papua Tengah	4,913

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri
tahun 2023

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa secara nasional, di tahun 2023 wilayah Jawa Tengah 2,051,484 dengan data stunting mencapai jumlah yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang ada di Indonesia berbeda dengan provinsi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2003, bahwa provinsi Jawa Tengah berada dirututan ke-3 dari total 38 Provinsi. Hal tersebut harus diperhatikan dalam penanggulangan stunting, khususnya provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia sendiri telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan, yaitu seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat pada pasal 141, 142 dan 143. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan. (Aprillia Kinanti, 2022.).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 “Desa yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).” Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus semakin ditekan untuk dapat mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat

nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018). Adapun sisanya mengalami masalah gizi lain. (Fitriani Pramita, dkk., 2020).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Riskesdas) 2019, jumlah anak usia dini di Indonesia adalah 23 juta. Di mana, 6,3 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting. Berdasarkan Survei Indonesia tentang Status Gizi Balita (SSGBI) Tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu sebesar 27,67%, masih jauh dari nilai standar WHO. Indonesia masih menduduki posisi 4 di peringkat dunia. (Azahra, Hana, & Arifiyani, 2023).

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi dalam jangka waktu yang lama karena pola makan yang tidak mencukupi kebutuhan gizi. Retardasi pertumbuhan terjadi saat janin masih dalam kandungan dan tidak terlihat sampai usia dua tahun. Malnutrisi pada usia muda meningkatkan kematian bayi dan anak, membuat orang dewasa mudah sakit dan memperburuk sikap. Kemampuan kognitif mereka yang terkena dampak juga menurun, menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia (Mulyadi dkk, 2022).

Tabel 2. Data Stunting di Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No.	Kabupaten	Jumlah Balita
1.	Banjarnegara	18,3
2.	Tegal	17,7
3.	Wonosobo	16,0
4.	Purbalingga	13,3
5.	Magelang	13,1
6.	Klaten	12,8
7.	Temanggung	12,3
8.	Jepara	11,9
9.	Rembang	11,8
10.	Banyumas	11,2

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri tahun 2023

Tabel diatas menerangkan bagaimana stunting di Kabupaten Banyumas menduduki peringkat ke 10, hal ini menunjukkan adanya stunting di Kabupaten Banyumas harus diperhatikan serta adanya penanggulangan stunting, supaya di Kabupaten Banyumas yang terkena penyakit stunting akan semakin turun dari tahun ke tahun.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Banyumas pada Februari 2023 sebesar 11,35%. Hasil tersebut didapat berdasarkan penimbangan serentak (Operasi Timbang Serentak) di seluruh puskesmas melalui posyandu di Kabupaten Banyumas. Dari 96.276 balita ditimbang, diketahui sebanyak 10.932 balita stunted (terindikasi stunting berdasarkan tinggi badan pendek dan sangat pendek). Hasil prevalensi dan jumlah stunted di masing-masing kecamatan, puskesmas, dan desa. Berikut hasil Pemantauan Status Gizi (Psg) 2 - 5 Tahun Per Kelurahan Wilayah Kabupaten Banyumas Bulan Februari Tahun 2023

Tabel 3.. Data status gizi Kecamatan Purwokerto Selatan tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Diukur	Status TB/U		Stunted	Prevelensi (%)
			Pendek	Sangat Pendek		
1.	Karangklesem	335	16	28	44	13,13
2.	Teluk	357	7	36	43	12,04
3.	Karangpucung	329	12	31	43	13,07
4.	Tanjung	251	2	24	26	10,36
5.	Purwokerto Kidul	119	3	13	16	13,45
6.	Berkoh	208	2	10	12	11,06
7.	Purwokerto Kulon	135	2	10	12	8,89

Sumber : Bappedalitbang Banyumas tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan keberadaan stunting di Kecamatan Purwokerto Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan stunting khususnya di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang dimana menduduki posisi kedua dari total 7 Kelurahan, hal ini bahwa adanya stunting harus di perhatikan serta adanya pencegahan dari pemerintah maupun dari pihak Kelurahan agar bisa melakukan pencegahan penanggulanagan stunting khususnya di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

Asupan makanan ibu hamil selama kehamilan harus tercukupi. Selain itu pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. (Iswanto, 2021). Berikut data Hasil Operasi Timbang Bulan Agustus Wilayah Kerja Puskesmas Purwokerto Selatan Tahun 2023.

Tabel 4. Data Hasil Operasi Timbang Bulan Agustus Tahun 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Total Balita	Jumlah Balita yang Datang dan Ditimbang	Wasting	Stunting
1.	Karanglesem	1107	602	15,61	66
2.	Karangpucung	999	440	13,18	49
3.	Teluk	1372	707	11,6	46
4.	Tanjung	690	419	11,93	41
5.	Purwokerto Kulon	318	181	17,13	34
6.	Berkoh	295	161	11,55	34
7.	Purwokerto Kidul	295	161	19,25	19
	Total	5443	2891	13,49	289

Sumber : Data Olah Penulis

Berdasarkan tabel diatas, di Kelurahan Teluk adanya peningkatan balita yang terkena stunting. Untuk data diatas diambil dari program posyandu dengan cara melaksanakan operasi timbang.

Tabel 5. Data Stunting Kelurahan Teluk

No.	Kelurahan Teluk	Jumlah Balita (Anak0	Stunting		Prevalensi (%)
			Pendek (Anak)	Sangat Pendek (Anak)	
1.	2021	718	13	3	2.2
2.	2022	752	23	7	4.0
3.	2023	698	49	22	10.2

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri tahun 2023

Berdasarkan data tabel diatas menjelaskan ada 3 tahun peningkatan jumlah balita yang terkena stunting. Pada tahun 2023 meningkatnya meningkatnya prevalensi 10.2%. Berkaitan masalah fenomena di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai masalah stunting yang terjadi agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang khususnya masyarakat Kelurahan Teluk dengan tujuan berkurangnya penderita stunting di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penelitian ini di angkat dengan judul **“Strategi Penanggulangan Stunting di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Penanggulangan Stunting di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi penanggulangan stunting di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta bagi disiplin ilmu dan mampu menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai terkait penanggulangan stunting.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam menganalisis penanggulangan stunting di Kelurahan Teluk, agar lebih maksimal dan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan stunting.